

PAJAK SARANG BURUNG WALET

2021

PERDA KAB. MAMUJU NO. 7 LD. 2021/NO. 7, TLD NO. 2, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pajak Sarang Burung Walet perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pajak Sarang Burung Walet, yang isinya memuat :
 1. Ketentuan Umum,
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak,
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak,
 4. Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak,
 5. Tata Cara Pemungutan,
 6. Saat Pajak Terutang,
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan,
 8. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak,
 9. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi,
 10. Keberatan dan Banding,
 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,
 12. Kedaluwarsa,
 13. Pembukuan dan Pemeriksaan,
 14. Insentif Pemungutan,
 15. Penyidikan,
 16. Ketentuan Pidana,
 17. Ketentuan Penutup

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 23 Nopember 2021.
 - Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Lamp : 5 Hlm

